



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
DIREKTORAT DANA TRANSFER KHUSUS

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 8, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3866120,
FAKSIMILE (021) 3866120; LAMAN WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-13/PK.3/2021 10 Februari 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 5 (lima) lembar
Hal : Pelaksanaan Kajian Implementasi Dana Alokasi Khusus Implementation Review (DAK IR)

Yth. Bupati/Walikota (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kajian Implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK *Implementation Review* - DAK IR), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kajian DAK IR dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan *Public Financial Management Multi Donor Trust Fund (PFM MDTF)* Fase III yang merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan dan Bank Dunia (*World Bank*). Kajian bertujuan untuk memberikan gambaran kepada Pemerintah Pusat tentang Kinerja Pelaksanaan DAK Fisik di Daerah, khususnya di bidang Jalan, Air Minum, dan Sanitasi, maupun di bidang Pendidikan dan Kesehatan. Kajian akan meneliti kinerja pelaksanaan DAK Fisik di tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi. Hasil kajian akan digunakan sebagai rekomendasi kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan DAK Fisik di masa mendatang.
2. Untuk melaksanakan kajian tersebut, Tim Kajian yang dikoordinir Bank Dunia akan melakukan kegiatan pengumpulan data dengan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan DAK Fisik, antara lain BAPPEDA, BPKAD, Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD dan Inspektorat Daerah.
3. Kegiatan pengumpulan data akan dilakukan melalui metode Wawancara (*in-depth interview*) bagi 8 Kab/Kota, dan metode Survei/Pengisian Kuesioner bagi 50 Kab/Kota lainnya (daftar terlampir). Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data diutamakan untuk dilaksanakan secara daring (*online*) yang akan dikoordinasikan oleh Tim Kajian, namun tetap membuka adanya opsi kegiatan kunjungan langsung ke lapangan sekiranya dibutuhkan. Adapun jadwal pelaksanaan Kajian dan tautan (*link*) pengisian kuesioner akan diberitahukan selanjutnya oleh Tim Kajian kepada setiap Daerah yang terpilih dalam waktu dekat.
4. Kami sangat mengapresiasi partisipasi Daerah dalam pelaksanaan kajian ini dan mengharapkan Daerah untuk dapat mengikuti wawancara, mengisi survey, dan menyampaikan dokumen yang dibutuhkan oleh Tim Kajian dalam mengevaluasi Kinerja DAK Fisik di Daerah (daftar daerah dan daftar dokumen terlampir).
5. Sebagai bentuk apresiasi terhadap Daerah yang berpartisipasi dalam kajian DAK IR, Tim Kajian akan memberikan penghargaan khusus kepada Kepala Daerah berupa Sertifikat Penghargaan, yang akan diinformasikan lebih lanjut dalam surat pemberitahuan terpisah.
6. Sebagai dukungan terhadap pelaksanaan kajian, Bank Dunia dapat memberikan penggantian dana (*reimbursement*) atas biaya yang dikeluarkan Daerah untuk pengiriman dokumen dan biaya pemakaian internet ketika mengikuti wawancara dan mengisi kuesioner. Adapun ketentuan dan mekanisme penggantian dana tersebut akan diberitahukan lebih lanjut oleh Tim Kajian kepada Daerah yang berpartisipasi.

7. Untuk memperlancar pelaksanaan kajian, kami meminta Saudara untuk mengisi Lembar Konfirmasi, dan menunjuk 1 (satu) orang pejabat sebagai Koordinator dalam pelaksanaan kajian yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah ini.
8. Untuk informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan kajian ini, Saudara dapat menghubungi **Call Center Dering DJPK** melalui **hotline** di nomor: **150420**, atau **WhatsApp 0811-150420-7**, atau melalui **contact person Sdri. Andyan** di nomor **082126911140** atau **Sdri. Sukma** di nomor: **081380740023**.

Sebagai informasi, dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Dana Transfer Khusus



Ditandatangani secara elektronik
Putut Hari Satyaka

Tembusan:

1. Jorgen Rene Blum (*Senior Public Sector Specialist*)
Governance Global Practice - World Bank



Lampiran I
Surat Direktur Dana Transfer Khusus

Daftar Daerah terpilih untuk Metode in-depth interview/wawancara:

1. Walikota Samarinda
2. Walikota Bengkulu
3. Walikota Pekanbaru
4. Bupati Pekalongan
5. Bupati Manggarai
6. Bupati Pangkajene Kepulauan
7. Bupati Lombok Barat
8. Bupati Jayapura



Lampiran II
Surat Direktur Dana Transfer Khusus

Daftar Daerah terpilih - metode survey/pengisian kuesioner:

1. Bupati Banjar
2. Bupati Bulungan
3. Bupati Keerom
4. Bupati Bangka Tengah
5. Bupati Timor Tengah Utara
6. Bupati Tanggamus
7. Bupati Dharmasraya
8. Bupati Barito Timur
9. Bupati Pohuwato
10. Bupati Aceh Barat
11. Bupati Enrekang
12. Bupati Muaro Jambi
13. Bupati Muara Enim
14. Bupati Tapin
15. Bupati Ngawi
16. Bupati Sampang
17. Bupati Tabanan
18. Bupati Pesawaran
19. Walikota Tanjung Pinang
20. Bupati Bantaeng
21. Bupati Bone
22. Bupati Karimun
23. Bupati Kudus
24. Walikota Surakarta
25. Walikota Manado
26. Bupati Boyolali
27. Bupati Gresik
28. Bupati Magelang
29. Bupati Sleman
30. Walikota Ambon
31. Walikota Medan
32. Walikota Padang Panjang
33. Bupati Pesisir Selatan
34. Bupati Way Kanan
35. Bupati Gunung Mas
36. Bupati Lamandau
37. Bupati Kota Baru
38. Bupati Tulang Bawang Barat
39. Bupati Nabire
40. Bupati Sambas
41. Bupati Bolaang Mongondow Timur
42. Bupati Dompu
43. Bupati Sigi
44. Bupati Teluk Wondama
45. Bupati Halmahera Barat
46. Bupati Nias Barat
47. Bupati Kepahiang
48. Bupati Barito Kuala
49. Bupati Padang Lawas Utara
50. Bupati Jember



Lampiran III
Surat Direktur Dana Transfer Khusus

Daftar Dokumen yang wajib disiapkan oleh Pemda:

No.	Dokumen	Unit kerja pengampu
1.	RPJMD TA 2018	<i>Bappeda</i>
2.	Renstra SKPD TA 2018	<i>Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan</i>
3.	Renstra DAK Fisik TA 2018, apabila ada	<i>Bappeda, Dinas PU</i>
4.	RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) TA 2018 dan TA 2019	<i>Bappeda</i>
5.	Renja SKPD TA 2018 dan TA 2019	<i>Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan</i>
6.	KUA dan PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) untuk TA 2018 dan TA 2019	<i>BPKAD</i>
7.	APBD TA 2018 dan TA 2019	<i>BPKAD</i>
8.	APBD Penjabaran TA 2018 dan TA 2019	<i>BPKAD</i>
9.	RKA SKPD untuk TA 2018 dan TA 2019	<i>Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan</i>
10.	Dokumen terkait kriteria pemilihan proyek belanja modal dan proyek prioritas pada tahun 2019, apabila ada	<i>Bappeda</i>
11.	Catatan Hasil Reviu APIP untuk TA 2019	<i>APIP/Inspektorat Daerah</i>
12.	Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD/LAKIP) untuk TA 2018 dan TA 2019	<i>Bappeda</i>



**LEMBAR KONFIRMASI KESEDIAAN MENGIKUTI KEGIATAN
KAJIAN DANA ALOKASI KHUSUS IMPLEMENTATION REVIEW (DAK IR)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
No. HP/e-mail :
Jabatan :
Unit kerja :
Pemerintah Daerah :

Menyatakan bersedia untuk menjadi Partisipan dalam kegiatan Kajian Dana Alokasi Khusus Implementation Review yang diselenggarakan oleh DJPK yang bekerjasama dengan *World Bank*. Untuk mempermudah komunikasi, kami menugaskan pejabat/pegawai sebagai koordinator narahubung (*contact person*) untuk pelaksanaan Kajian sebagai berikut:

Nama :
No. HP/e-mail :
Jabatan :
Unit kerja :
Pemerintah Daerah :

Demikian lembar konfirmasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Februari 2021
Yang membuat pernyataan,

.....
NIP

Catatan : Lembar konfirmasi yang telah dilengkapi dapat disampaikan kembali kepada Tim Kajian secara elektronik (melalui foto/scan) dan dikirim melalui nomor WA sebagai berikut:

1. Sdri. Andyan, di 082126911140; atau
2. Sdri. Sukma, di 081380740023.

